



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFISIENSI DAN KINERJA ANGGARAN PERGURUAN TINGGI VOKASI DI INDONESIA

The Impact of The Covid-19 Pandemic on the Efficiency and Budget Performance of Vocational University in Indonesia

Santorry¹, Muhammad Heru Akhmadi², Aang Prabudi Sanusi³

Info Artikel

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, santorry@pknstan.ac.id

² Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, heru.cio@gmail.com

³ Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, aangajaib@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima 24 – 08 – 2023

Direvisi 22 – 11 – 2023

Disetujui 27 – 11 – 2023

Tersedia online 01 – 12 – 2023

JEL Classification: G2, G3, I2

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused a crisis in global economic growth. To confirm the situation, this research aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on several vocational colleges in Indonesia. This research uses a quantitative descriptive method with collected data in 2020-2021 from vocational colleges in the Directorate General of Vocational Education, Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The results indicate a decline in budget efficiency and budget performance by 19 percent and 4.49 percent respectively. The research also proves that the college management did not anticipate the effect Covid-19 pandemic on budget efficiency and operational performance. This is identified by the absence of differences in the level of budget efficiency and performance levels at each college. This situation shows that the management did not make any efforts to maintain financial performance during the COVID-19 pandemic.

Keywords : *efficiency, performance budgeting, public service agency*

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap operasional perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel 10 PTN-BLU di lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat efisiensi anggaran dan penurunan tingkat kinerja pada 10 PTN-BLU masing-masing sebesar 19 persen dan 4,49 persen pada kurun waktu tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pandemic Covid-19 telah menyebabkan penurunan efisiensi anggaran dan kinerja perguruan tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada inovasi pengelolaan keuangan PTN-BLU dalam mengantisipasi krisis yang disebabkan pandemic Covid-19. Hal ini terindikasi dari tidak adanya perbedaan tingkat efisiensi anggaran dan tingkat kinerja pada masing-masing PTN-BLU pada kurun waktu 2020-2021.

Kata kunci: efisiensi, kinerja anggaran, pendidikan vokasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya melalui sektor pendidikan akan berpengaruh dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Maryozi et al., 2022). Saat ini Indonesia menempati urutan 107 Indeks Pembangunan Manusia dengan skor 0,718, masih kalah jauh dengan negara lainnya, seperti Jepang (peringkat 19, skor 0,919), Korea Selatan (peringkat 24, skor 0,916), Singapura (peringkat 11, skor 0,938), Brunei Darussalam (peringkat 47, skor 0,838), Malaysia (peringkat 62, skor 0,810), dan Thailand (peringkat 79, skor 0,777) (United Nations Development Programme, 2020).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal yang mendesak sehubungan dengan periode ledakan populasi yang diproyeksikan hingga tahun 2030. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Sektor pendidikan perlu mendapat perhatian khusus karena memberikan dampak besar terhadap kemajuan masyarakat dan negara khususnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bentuk investasi "*human investment*", dimana untuk menghasilkan output tersebut dibutuhkan anggaran yang dikenal dengan anggaran pendidikan (Widodo & Khusaini, 2014).

Alokasi anggaran pendidikan Indonesia ditetapkan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ke-4). Anggaran mandatori tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut belum dikatakan efektif jika tujuan dari kebijakan, sasaran, transparansi birokrasi maupun proses penyaluran dana belum dikelola dengan baik. Sehingga diperlukan tatakelola yang membantu tercapainya tingkat keberhasilan kebijakan pendidikan dengan penggunaan anggaran seefisien dan optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkatan pendidikan dibagi dalam beberapa jenjang antara lain pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah penting dalam mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat, tetapi pendidikan tinggi tidak kalah penting, tidak hanya sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang siap kerja dan inovatif namun juga sebagai tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan melalui riset dan penelitian.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak (Jati, 2015). Berbagai permasalahan seperti jumlah mahasiswa yang lulus dan putus kuliah, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dosen dan tenaga kependidikan (Winarti, 2013) serta performa riset yang buruk menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan dalam dunia pendidikan tinggi dapat dikelola dengan baik. Ukuran pengelolaan yang baik, tercermin dalam efisiensi dan produktivitas Lembaga Pendidikan Tinggi. Adapun pengukuran efisiensi dan produktivitas lembaga pendidikan tinggi memiliki pendekatan yang berbeda-beda di tiap negara, tergantung pada kebijakan pengaturan pembiayaan dan struktur alokasi sumber daya Lembaga Pendidikan Tinggi (Mandl et al., 2008).

Lebih lanjut, Hekinus Manao, mantan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan utama pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu (i) mengenai besaran dukungan keuangan pemerintah dan swasta pada Program Pendidikan Tinggi, dan (ii) tata kelola (*governance*) keuangan negara yang dianggap kurang fleksibel bagi manajemen perguruan tinggi negeri. Sebenarnya masalah fleksibilitas khususnya dalam pengaturan belanja dan mengelola pendapatan PNBP, telah diantisipasi Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Melalui pola ini, setiap satuan kerja diberikan fleksibilitas dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari masyarakat, hasil kerja sama, ataupun hibah secara langsung tanpa disetorkan terlebih dahulu ke kas negara.

Beberapa riset terdahulu telah meneliti tentang kinerja Badan Layanan Umum. Penelitian Oktavia (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BLU yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan, meskipun untuk kinerja pelayanan masih ditentukan oleh faktor lain seperti kunjungan pasien dan pandemik COVID-19. Kinerja BLU juga dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, dimana terdapat kategori ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan dibandingkan terhadap realisasi anggarannya (Prasetyo et al., 2022). Selain itu kinerja BLU juga berpengaruh terhadap kemandirian BLU. Beberapa indikator kinerja operasi dapat menjadi alat pengukuran seperti *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Turn Over Interval* (TOI) dan *Average Length of Stay* (AVLOS). Sementara dari sisi kinerja keuangan, mencakup *Current Ratio* (CR), *Return on Investment* (ROI) dan Rasio Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya operasional (PB) pada studi kasus rumah sakit (Ajib & Thomas, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi kepada perguruan tinggi dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau membentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang bertujuan menghasilkan perguruan tinggi yang bermutu. Termasuk didalamnya adalah perguruan tinggi vokasi yang berada dibawah koordinasi Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019.

Pandemic Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah memukul pertumbuhan ekonomi global. Hampir seluruh Lembaga pemerintah dan swasta terdampak karena adanya pembatasan sosial. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dampak pandemic covid-19 terhadap pengelolaan keuangan BLU perguruan tinggi vokasi. Lebih lanjut penelitian ini ingin mengkonfirmasi apakah pandemik Covid-19 mempengaruhi efisiensi dan kinerja anggaran BLU pada sepuluh perguruan tinggi vokasi yang berada dibawah koordinasi Ditjen Pendidikan Vokasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengelolaan BLU perguruan tinggi vokasi khususnya yang berada di bawah naungan Ditjen Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) Kemendikbudristek.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perguruan Tinggi (PT)

Di Indonesia, perguruan tinggi telah berdiri sejak pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis dimana salah satu programnya adalah pendidikan. Program ini mendorong timbulnya berbagai sekolah, dimulai dari sekolah dasar untuk belajar membaca,

menulis, dan menghitung, kemudian ditingkatkan pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi ini kemudian hari menjadi beberapa Universitas dan Fakultas yang berada di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan tinggi didefinisikan sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Dalam kerangka bentuk perguruan tinggi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh swasta. Selanjutnya menurut bentuk penyelenggaraan pendidikan, perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi:

- Universitas, yaitu PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi pada berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi bahkan apabila memenuhi persyaratan, universitas dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis profesi.
- Institut, yaitu PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi pada beberapa rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan apabila memenuhi persyaratan, dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis profesi.
- Sekolah Tinggi, PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi hanya pada satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan apabila memenuhi persyaratan, dapat juga menyelenggarakan pendidikan berbasis profesi.
- Politeknik, PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan apabila memenuhi persyaratan, dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis profesi.
- Akademi, PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi pada satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.
- Akademi Komunitas, merupakan PT yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi setingkat diploma I atau II pada satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi berbasis keunggulan lokal atau dapat juga untuk memenuhi kebutuhan khusus.

2.2. Badan Layanan Umum (BLU)

Secara konseptual BLU merupakan pengejawantahan dari teori agensifikasi, yang secara umum dapat diartikan adanya pemisahan antara fungsi kebijakan (regulator) dan fungsi pelayanan publik pada struktur organisasi pemerintah. Fungsi kebijakan dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan fungsi pelayanan publik dilaksanakan oleh kantor-kantor yang biasa disebut dengan kantor pelayanan. Berdasarkan teori agensifikasi, Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan mandat berbentuk kontrak kinerja kepada kepala kantor pelayanan atau yang sejenisnya dalam rangka melaksanakan satu atau beberapa program sejenis yang dikelola secara profesional. Secara eksplisit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjelaskan bahwa keberadaan BLU bukan hanya sebagai format baru pengelolaan keuangan negara, namun juga sebagai cara baru dalam transformasi manajemen keuangan sektor publik (*public financial management reform*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU merupakan instansi pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang dapat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan tujuan tidak mencari keuntungan. Program kegiatan yang dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian keberadaan BLU bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan memegang prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai pengelolaan keuangan memiliki fleksibilitas dalam bentuk keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis perusahaan yang sehat dalam konteks pelayanan publik. Beberapa kelebihan PPK-BLLU ini adalah keleluasaan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, instansi pemerintah juga dapat mengelola hasil pendapatan dari layanannya secara leluasa dalam upaya meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Sebagai penyeimbang dari PPK-BLU yang fleksibel, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandardisasikan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Dengan demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU juga diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2.3. Pengukuran Efisiensi

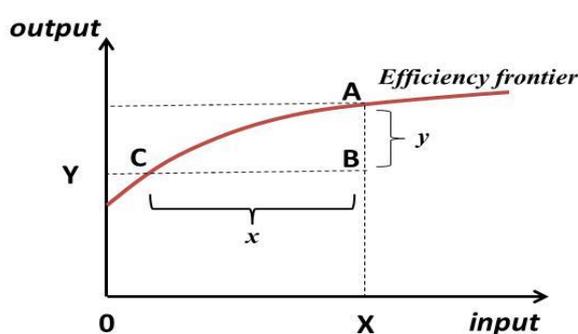
Efisiensi merupakan kemampuan menghasilkan tingkat *output* maksimal dengan menggunakan *input* yang tersedia/tertentu (*technical efficiency*) atau kemampuan mengoptimalkan input dengan struktur harga dan teknologi tertentu (*allocative efficiency*), (Farrell, 1957). Pada sistem pendidikan tinggi, output didefinisikan produksi dan penyebaran pengetahuan melalui pengajaran dan penelitian (Aubyn et al., 2009). Perguruan tinggi sebagai suatu organisasi dikatakan efisien jika *output* yang dihasilkan dapat ditingkatkan tanpa menambah input dan menurunkan *output* lainnya. Atau jika *input* dapat diturunkan tanpa mengurangi *output* yang dihasilkan maupun tanpa menambah *input* tertentu lainnya.

Faktor-faktor penentu efisiensi pada perguruan tinggi digolongkan menjadi tiga kategori : faktor internal, faktor eksternal, dan faktor yang berasal dari struktur kepemilikan, (Caves & Barton, 1990). Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi tiga, yaitu faktor internal yang dibedakan dari ukuran dan beban dengan melihat seberapa besar dukungan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pada pendapatan perguruan tinggi, faktor eksternal yang dicerminkan dari kualitas dan latar belakang mahasiswa, dan faktor staf yang dicerminkan oleh kualitas pengajar/personil penelitian dilihat dari usia personil yang aktif melakukan penelitian.

Suatu negara dapat mempertahankan nilai pelayanan masyarakatnya dan menyesuaikan nilai APBN-nya yang disebut dengan Input Efficiency. Di sisi lain, suatu negara juga dapat

mempertahankan nilai APBN-nya dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang diberikan, yang disebut dengan Output Efficiency. Dengan demikian, informasi inefisiensi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan menilai APBN.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur atau memperkirakan bentuk kurva produksi. Metode yang sering digunakan yakni: *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA), dan *Distribution Free Approach* (DFA) (Berger & Humphrey, 1997). Penelitian Berger dan Humphrey yang menyurvei 130 studi yang menerapkan analisis efisiensi juga menunjukkan bahwa berbagai metode pengukuran efisiensi tidak selalu memberikan hasil yang konsisten dan bahkan menyarankan beberapa cara agar metode pengukuran efisiensi dapat ditingkatkan untuk menghasilkan temuan yang lebih konsisten, akurat, dan bermanfaat.



Gambar 1. Kurva Kemungkinan Batas Produksi/Efficiency Frontier

Efisiensi tidak dapat diukur secara langsung. Sehingga perlu digunakan pendekatan yang berbeda-beda terhadap data dan kerangka metodologi yang digunakan. Salah satu pendekatan alternatif adalah berdasarkan konsep Efficiency Frontier. Gambar 1 mengilustrasikan konsep ini. Terdapat dua negara, yaitu Negara A dan B yang memiliki nilai pengeluaran sektor publik atau APBN (sebagai input) yang sama. Negara A memiliki nilai pelayanan ke masyarakat (sebagai output) yang lebih tinggi, maka negara A dianggap lebih efisien dibandingkan Negara B. Selain itu, negara A juga dianggap berada pada batas kurva produksi. Demikian pula pada Negara C yang APBN-nya lebih rendah, maka pelayanan ke masyarakat juga lebih rendah. Efisiensi pada negara A dan C memiliki arti bahwa mereka memiliki pelayanan masyarakat yang optimal dalam nilai APBN masing-masing negara.

Pelayanan pada negara B belum efisien, sehingga terdapat dua alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensinya. Pertama, negara B meningkatkan output-nya hingga setara dengan negara A sejumlah y . Kedua, negara B dapat mencapai batas kurva produksi dengan menurunkan nilai APBN-nya (input) hingga setara negara C sejumlah x . Ilustrasi ini memberikan pengertian bahwa pada negara B terdapat dua pilihan untuk mencapai kurva produksi.

2.4. Kinerja (Performance)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah pencapaian suatu hal, keberhasilan atau kemampuan dalam bekerja. Kinerja dapat juga dimaknai sebagai hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan individu/ organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan. Dalam hal ini kinerja Badan Layanan Umum menggambarkan seberapa baik perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Kinerja dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki yang dapat berupa kompetensi dan karakter sumber daya manusia, dan modal kerja (termasuk sumber daya keuangan).

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 11/PB/2021, penilaian kinerja BLU menggunakan penilaian kinerja berdasarkan maturitas yang menjelaskan tingkat kematangan manajemen BLU dalam menyelenggarakan tata kelola yang baik. Penilaian maturitas terdiri atas 2 hal, *Pertama*, penilaian berbasis hasil (*result based*) yang menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dan bersifat kuantitatif. *Kedua*, penilaian berbasis proses (*process based*) yang menilai kualitas proses yang diukur dari input (masukan) maupun output (keluaran) yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan.

Penilaian berbasis hasil, terdiri atas aspek keuangan dan aspek pelayanan publik. Aspek keuangan mencakup tren perkembangan keuangan BLU dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dengan beberapa seperti likuiditas, efisiensi, efektifitas, dan tingkat kemandirian. Sedangkan pada aspek pelayanan mencakup tren perkembangan kualitas pelayanan BLU dalam jangka waktu 3 tahun sesuai dengan penugasan yang dilaksanakan oleh BLU, dimana indikatornya mencakup indeks kepuasan masyarakat, efisiensi waktu pelayanan, sistem pengaduan layanan, dan tingkat keberhasilan pemenuhan layanan.

Terkait dengan penganggaran, capaian kinerja dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur beberapa variabel sebagai berikut:

- a. capaian output;
- b. penyerapan anggaran;
- c. efisiensi; dan
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Robst (2001), dengan judul *Cost Efficiency in Public Higher Education*. Penelitian tersebut bertujuan mengukur sejauh mana besaran alokasi dana dari pemerintah berpengaruh terhadap nilai efisiensi Lembaga Pendidikan Tinggi di Amerika Serikat dengan fungsi biaya. Variabel input dalam penelitian ini adalah total anggaran belanja Lembaga Pendidikan Tinggi, Anggaran Penelitian, alokasi anggaran pemerintah kepada Lembaga Pendidikan Tinggi dan variabel output berupa jumlah mahasiswa semester 2 dan semester 4. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara efisiensi dengan sistem pada universitas. Universitas dengan pendanaan pemerintah yang lebih besar cenderung lebih efisien dibanding universitas dengan pendanaan pemerintah yang lebih kecil.

Selanjutnya, penelitian Daghbashyan (2014), dengan judul *The Economics Efficiency of Swedish Higher Education Institutions*, meneliti efisiensi anggaran belanja di 30 universitas di Swedia dengan menggunakan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Variabel input dalam penelitian tersebut adalah *Average annual salary*, belanja modal, fasilitas dan peralatan pendidikan. Adapun variabel outputnya adalah jumlah lulusan di fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada efisiensi anggaran belanja universitas di Swedia.

Penelitian De Witte & López-Torres (2017) dengan judul “Efficiency in education: a review of literature and a way forward”, memberikan gambaran luas literatur tentang efisiensi dalam pendidikan. Ini merangkum input, output dan variabel kontekstual yang diterapkan pada penelitian sebelumnya, serta sumber data yang digunakan di bidang efisiensi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga mengulas metodologi seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA), *malmquist index*, *bootstrap*, *robust frontiers*, *metafrontier* atau *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Berdasarkan wawasan tinjauan literatur, paper ini memberikan beberapa cara ke depan untuk membangun hubungan antara literatur 'ekonomi pendidikan' parametrik dan 'efisiensi dalam literatur pendidikan' (semi-parametrik). Peneliti menunjukkan kesamaan antara pencocokan dan efisiensi bersyarat; perbedaan-dalam-perbedaan dan metafrontiers; dan regresi kuantil dan batas parsial.

Penelitian Jana (2017), meneliti efisiensi 11 universitas di negara bagian Benggala Barat (India) dengan menggunakan DEA. Data berasal dari laporan penilaian Dewan Penilaian dan Akreditasi Nasional (NAAC) yang dilakukan selama tahun 2014 hingga 2016. Hasil studi menunjukkan bahwa ada variasi yang luas dalam skor efisiensi universitas dan juga ada perbedaan antara peringkat skor efisiensi dan skor NAAC.

Penelitian lainnya, De Kruijf & Van Thiel (2018), meneliti fenomena meningkatnya penggunaan lembaga semi-otonom untuk penyampaian layanan pemerintah di Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol politik lebih kuat dari yang diharapkan, secara negatif memengaruhi otonomi ZBO (*Zelfstandige Bestuurs Organen* atau Badan Administratif Independen). Selain itu, Peneliti memperkenalkan perspektif permintaan warga akan layanan sebagai alat baru untuk menjelaskan keragaman dalam kendali.

Penelitian Waluyo (2018), mengeksplorasi praktik otonomi keuangan dan mengendalikan isu agensifikasi yang muncul di sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan studi kasus dari 7 universitas negeri semi-otonom di Indonesia (PTN berbentuk Badan Layanan Umum atau PTNBLU). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan 17 responden termasuk manajemen universitas, pembuat kebijakan, dan pakar. Temuan penelitian ini menyoroti keseimbangan yang tidak stabil antara otonomi keuangan dan praktik kontrol di universitas. Studi ini memberikan bukti empiris tentang agensifikasi di sektor pendidikan tinggi dengan penekanan pada dimensi keuangan otonomi dan kontrol di negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Penelitian Pribadi et al. (2022) mengungkapkan bahwa otonomi keuangan yang lebih besar memfasilitasi efisiensi perguruan tinggi di Indonesia yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari penelitian menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) menunjukkan bahwa universitas yang memiliki skor efisiensi keuangan yang tinggi memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghasilkan outputnya pada situasi ketidakpastian ekonomi, seperti pandemic Covid-19.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan terhadap perguruan tinggi vokasi di bawah pembinaan Ditjen Vokasi Kemendikbudristek. Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat efisiensi keuangan dengan membandingkan sisi input dan output yang dihasilkan perguruan tinggi vokasi. Penelitian ini mengambil sepuluh satker BLU politeknik vokasi sebagai sumber data dengan periode waktu tahun 2020-2021.

Dalam mengukur efisiensi, penelitian ini menggunakan variable input dan output sebagai bagian dari perhitungan. Definisi operasional dan pengukuran variabel input dan output adalah sebagai berikut:

1. *Input*, merupakan semua sumber daya yang dimiliki organisasi dan perlu diproses sehingga dapat menghasilkan output dan outcome. Dalam penelitian ini, variabel input yang digunakan adalah besaran pagu anggaran yang merupakan batas tertinggi alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-K/L). Pagu anggaran yang digunakan adalah alokasi anggaran pada PTN BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud TA 2018 sampai dengan 2021 (10 satker Politeknik/Akademi).
2. *Output*, merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan program/ kebijakan. Output yang ditentukan pada penelitian ini antara lain jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah penelitian yang dihasilkan.

Untuk pengukuran kinerja anggaran, khususnya terhadap aspek implementasi merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/ 2021, berupa Penyerapan anggaran, Tingkat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan (implementasi), Pencapaian keluaran (output), dan Nilai kinerja anggaran. Definisi operasional dari beberapa variable kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran, merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
2. Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, merupakan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
3. Pencapaian output merupakan nilai hasil yang membandingkan antara realisasi volume keluaran (output) dengan target volume keluaran (output)

3.2 Populasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil 10 satker Perguruan Tinggi Vokasi yang sudah ber-status Badan Layanan Umum yang menjadi populasi penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan 10 satker tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan Tinggi berada pada lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud;
- b. Perguruan Tinggi tersebut menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PPK-BLU) tahun 2018-2021; dan
- c. Perguruan Tinggi tersebut berbentuk politeknik/akademi.

Obyek penelitian ini difokuskan pada Perguruan Tinggi Negeri lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud yang telah ditetapkan sebagai BLU, dengan jumlah 10 politeknik/akademi. Data yang digunakan adalah data panel yang berasal dari 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud pada tahun 2020-2021 (2 tahun). Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus 2022. Jenis data dalam penelitian ini ada beberapa bentuk: pagu anggaran pada tiap satker/PTN (anggaran akhir tahun pada Satker PTN-BLU), Target volume keluaran, Target indikator kinerja keluaran, Rencana penarikan dana, Realisasi anggaran, Realisasi volume keluaran, dan Realisasi indikator kinerja keluaran).

Data tersebut digunakan untuk mengukur evaluasi kinerja anggaran, khususnya aspek implementasi, meliputi 5 (lima) hal, yaitu Penyerapan anggaran, Konsistensi antara

perencanaan dan pelaksanaan (implementasi), Pencapaian Keluaran (*output*), Tingkat Efisiensi, dan Nilai kinerja anggaran satker, sebagaimana diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKAKL. Data tersebut diperoleh dari website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atas Aspek Implementasi merupakan EKA yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja dalam penggunaan anggaran kegiatan/program dan pencapaian output-nya. EKA atas Aspek Implementasi dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satker. EKA atas Aspek Implementasi bertujuan mengukur variabel: capaian keluaran, yaitu capaian output program dan capaian output kegiatan, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

3.3 Teknik Analisis Data

Formulasi penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran (RA) dengan pagu anggaran (PA), sebagaimana rumus berikut: $P = RA/PA \times 100\%$, dengan P merupakan Penyerapan anggaran. Sehingga Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan deviasi Realisasi Anggaran dan Rencana Penarikan Dana kumulatif, sebagaimana rumus berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

dengan, K merupakan Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, RAK adalah Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan I, RPDK adalah Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke-n, dan n adalah Jumlah bulan.

Untuk perhitungan Pencapaian Keluaran (*Output*) harus memperhitungkan Capaian Keluaran di level Program (CKP) dan Capaian Keluaran Kegiatan (CKK). Adapun Formula Capaian Keluaran Program, dihitung dari rata-rata ukur secara geometrik (II) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (II) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator, sebagaimana rumus berikut:

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\frac{\prod_{i=1}^n \text{Realisasi Indikator}_i}{\prod_{i=1}^n \text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

dengan, CKP = Capaian Keluaran (*Output*) Program, m = jumlah Keluaran (*Output*) Program, dan n = Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program.

Sedangkan untuk Formula Capaian Keluaran Kegiatan, dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (II) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik (II), sebagaimana rumus berikut:

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

dengan, CKK = Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, RVK = Realisasi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan, TVK = Target volume Keluaran (*Output*) Kegiatan, M = Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan n = Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.

Adapun untuk pengukuran efisiensi, dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian Pagu Anggaran Keluaran dengan Capaian Keluaran dan Realisasi Anggaran Keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian Pagu Anggaran Keluaran dengan Capaian Keluaran, sebagaimana rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)}$$

dengan, E merupakan Efisiensi, PAKi = Pagu Anggaran Keluaran ke-i, RAKi = Realisasi Anggaran Keluaran ke-i, dan CKi= Capaian Keluaran ke-i.

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Khusus untuk pengukuran efisiensi, perlu dilakukan konversi terlebih dahulu untuk mendapatkan pengukuran tingkat efisiensi (NE), dengan rumus sebagai berikut:

dimana, E merupakan nilai efisiensi dan NE merupakan tingkat efisiensi. Dengan dilakukan konversi, maka tingkat efisiensi nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin menuju angka 1 maka makin efisien, begitu pula sebaliknya yaitu makin menuju angka 0 maka makin tidak efisien.

Terakhir, untuk Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I/program atau satuan kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E)$$

dengan, NKI = Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi, P = Penyerapan anggaran, K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, CKP = Capaian Keluaran (*Output*) Program, CKK = Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, NE = Nilai efisiensi, W_P = Bobot penyerapan anggaran, W_K = Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, W_CK = Bobot capaian keluaran, dan W_E = Bobot efisiensi. Adapun untuk bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi yaitu: W_P (penyerapan anggaran) sebesar 9,7%, W_K (konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan) sebesar 18,2%, W_CK (Capaian Keluaran/*Output*) sebesar 43,5%, dan W_E (Efisiensi) sebesar 28,6%.

Adapun penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran, yang meliputi Tingkat Kementerian/Lembaga, Tingkat eselon I/program, dan Tingkat satker. Pada penelitian ini, penilaian kinerja anggaran hanya pada level/tingkat satker saja. Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran (NKA), terdiri dari 5 (lima) kriteria, yaitu Sangat Baik

(NKA > 91), Baik (NKA, 81 s.d. 90), Cukup (NKA, 61 s.d. 80), Kurang (NKA, 51 s.d. 60), dan Sangat Kurang (NKA, ≤ 50). Selanjutnya, data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode kuantitatif (berupa analisis deskriptif), meliputi membandingkan data-data kuantitatif antara target dan realisasi maupun tren data dari tahun ke tahun, membandingkan hasil pengukuran antar instansi/satker, serta menganalisis rata-rata hasil pengukuran dan penilaian.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pola Dinamika Pagu Anggaran dan Daya Serap Anggaran

Sampel penelitian adalah 10 Satker PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud pada tahun 2020 dan 2021. Tabel 1 menunjukkan pagu anggaran pada 10 satker PTN BLU tahun anggaran 2020-2021.

Tabel 1. Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2020-2021

No.	Nama PTN-BLU	Anggaran (ribu rupiah)		Perubahan Anggaran
		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	100.260.788	102.807.685	2.546.897
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	177.647.176	289.276.734	111.629.558
3	Politeknik Negeri Lampung	89.306.222	86.521.167	(2.785.055)
4	Politeknik Negeri Jakarta	171.461.900	173.192.943	1.731.043
5	Politeknik Negeri Madiun	97.648.948	32.090.855	(65.558.093)
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	79.773.597	27.498.316	(52.275.281)
7	Politeknik Negeri Semarang	143.624.722	131.525.334	(12.099.388)
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	87.015.507	87.106.685	91.178
9	Politeknik Negeri Jember	150.621.776	146.491.047	(4.130.729)
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	35.389.867	3.857.600	(31.532.267)
Jumlah pagu anggaran (10 PTN-BLU)		1.132.750.503	1.080.368.366	(52.382.137)

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2022)

Dari tabel 1 di atas, terdapat penurunan pagu anggaran jika dibandingkan antara tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp52.382.137.000,00. Adapun untuk Tahun Anggaran 2020, pagu tertinggi terdapat pada Satker Politeknik Negeri Sriwijaya dengan pagu sebesar Rp177.647.176.000,00 dan pagu terendah terdapat pada Satker Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan pagu sebesar Rp35.389.867.000,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021, pagu tertinggi masih ditempati oleh Satker Politeknik Negeri Sriwijaya dengan pagu sebesar Rp289.276.734.000,00 (atau mengalami kenaikan pagu sebesar Rp111.629.558.000,00 dibandingkan dengan tahun 2020) dan pagu terendah terdapat pada Satker Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan pagu sebesar Rp3.857.600.000,00 (atau mengalami penurunan pagu sebesar Rp31.532.267.000,00 dibandingkan dengan tahun 2020).

Secara umum jika dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 dengan pagu tahun sebelumnya (tahun 2020), terdapat penurunan pagu anggaran pada 6 (enam) satker dan kenaikan pagu anggaran pada 4 (empat) satker. Adapun 6 (enam) satker yang mengalami penurunan pagu anggaran, yaitu Politeknik Negeri Lampung sebesar Rp2.785.055.000,00, Politeknik Negeri

Madiun sebesar Rp65.558.093.000,00, Politeknik Negeri Nusa Utara sebesar Rp52.275.281.000,00, Politeknik Negeri Semarang sebesar Rp12.099.388.000,00, Politeknik Negeri Jember sebesar Rp4.130.729.000,00, dan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar sebesar Rp31.532.267.000,00.

Kemudian, terdapat 4 (empat) Satker yang mengalami kenaikan pagu anggaran, yaitu Politeknik Negeri Lhokseumawe sebesar Rp2.546.897.000,00, Politeknik Negeri Sriwijaya sebesar Rp111.629.558.000,00, Politeknik Negeri Jakarta sebesar Rp1.731.043.000,00, dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebesar Rp91.178.000,00. Terdapat konsistensi urutan satker dengan pagu tertinggi (Politeknik Negeri Sriwijaya) dan pagu terendah (Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar) untuk tahun anggaran 2020 dan 2021.

Tabel 2. Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2021

No	Nama PTN-BLU	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	100.260.788	90.105.092	89,87	102.807.685	93.017.779	90,48
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	177.647.176	168.474.291	94,84	289.276.734	262.822.225	90,85
3	Politeknik Negeri Lampung	89.306.222	82.576.404	92,46	86.521.167	81.980.321	94,75
4	Politeknik Negeri Jakarta	171.461.900	142.192.662	82,93	173.192.943	148.189.948	85,56
5	Politeknik Negeri Madiun	97.648.948	93.874.568	96,13	32.090.855	30.606.832	95,38
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	79.773.597	67.855.190	85,06	27.498.316	23.838.168	86,69
7	Politeknik Negeri Semarang	143.624.722	119.212.929	83,00	131.525.334	117.214.353	89,12
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	87.015.507	80.330.014	92,32	87.106.685	79.779.387	91,59
9	Politeknik Negeri Jember	150.621.776	136.268.502	90,47	146.491.047	140.579.071	95,96
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	35.389.867	29.974.933	84,70	3.857.600	3.743.751	97,05
	Rerata Penyerapan Anggaran	1.132.750.503	1.100.864.586	89,24	1.080.368.366	981.771.837	90,87

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2022)

Dari tabel 2 di atas, secara umum rata-rata penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 89,24%. Adapun penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada Satker Politeknik Negeri Madiun (sebesar 96,13%) dan terendah pada Satker Politeknik Negeri Jakarta (sebesar 82,93%). Selanjutnya, pada tabel 2 di atas, secara umum rata-rata penyerapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 90,87%. Adapun penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada Satker Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar – Blitar (sebesar 97,05%) dan terendah pada Satker Politeknik Negeri Jakarta (sebesar 85,56%). Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2021, maka terdapat peningkatan daya serap anggaran yaitu sebesar 1,63 persen, Terdapat 3 (tiga) Satker yang mengalami penurunan daya serap anggaran, yaitu Satker Politeknik Negeri Sriwijaya (sebesar 3,98%), Politeknik Negeri Madiun (sebesar 0,75%), dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (sebesar 0,73%). Namun untuk 7 (tujuh) satker lainnya mengalami kenaikan daya serap anggaran.

4.2 Tingkat Konsistensi pada 10 PTN BLU

Secara umum rata-rata tingkat konsistensi mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,2 persen. Namun demikian, terdapat penurunan nilai konsistensi pada 3 (tiga) Satker, yaitu Satker

Politeknik Negeri Lampung (sebesar 7,79%), Politeknik Negeri Jakarta (sebesar 4,00%), dan Politeknik Negeri Jember (sebesar 3,17%). Adapun untuk 7 (tujuh) satker lainnya mengalami kenaikan tingkat konsistensi.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Konsistensi Tahun 2020 dan 2021

No.	Nama PTN-BLU	Konsistensi (dalam persen)		Perubahan Konsistensi (%)
		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	86,70	95,31	6,61
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	85,49	85,58	0,09
3	Politeknik Negeri Lampung	98,45	90,66	(7,79)
4	Politeknik Negeri Jakarta	86,37	82,37	(4,00)
5	Politeknik Negeri Madiun	99,22	99,49	0,27
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	65,15	66,54	1,39
7	Politeknik Negeri Semarang	87,33	93,18	5,85
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	88,99	90,42	1,43
9	Politeknik Negeri Jember	92,37	89,20	(3,17)
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	86,59	97,91	11,32
Rerata Tingkat Konsistensi		87,67	88,87	1,20

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

4.3 Tingkat Capaian Output pada 10 PTN BLU

Secara umum rata-rata tingkat capaian Output mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,25 persen (semula tahun 2020 sebesar 98,67 persen, menjadi 99,92 persen pada tahun 2021). Namun demikian, terdapat penurunan nilai Capaian Output pada 1 (satu) Satker, yaitu Satker Politeknik Negeri Sriwijaya (sebesar 7,70 persen). Adapun untuk 7 Satker lainnya, relatif tetap (berhasil mempertahankan Capaian Output), bahkan untuk 2 (dua) satker, yaitu Politeknik Negeri Lampung berhasil meningkatkan capaian Output sebesar 10,58 persen dan Politeknik Negeri Jember sebesar 2,72 persen.

Tabel 4. Perbandingan Tingkat Capaian Output Tahun 2020-2021

No.	Nama PTN-BLU	Capaian Output (dalam persen)		Perubahan (%)
		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	100,00	100,00	0,00
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	100,00	99,23	(0,77)
3	Politeknik Negeri Lampung	89,42	100,00	10,58
4	Politeknik Negeri Jakarta	100,00	100,00	0,00
5	Politeknik Negeri Madiun	100,00	100,00	0,00
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	100,00	100,00	0,00
7	Politeknik Negeri Semarang	100,00	100,00	0,00
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	100,00	100,00	0,00
9	Politeknik Negeri Jember	97,28	100,00	2,72
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	100,00	100,00	0,00
Rerata Capaian Output		98,67	99,92	1,25

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

4.4 Tingkat Efisiensi pada 10 PTN Vokasi

Tingkat efisiensi rata-rata mengalami penurunan pada periode tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 19 persen. Adapun Satker Politeknik Negeri Madiun dan Politeknik Negeri Nusa Utara memiliki tingkat efisiensi rata-ratanya paling tinggi yaitu sebesar 1,00 (atau 100 persen) karena mampu mempertahankan tingkat efisiensi pada skala maksimal. Sedangkan 8 PTN-BLU lainnya, tidak mampu mempertahankan tingkat efisiensi seperti pada tahun sebelumnya (tahun 2020) dan justru memperoleh tingkat efisiensi yang lebih rendah. Terdapat 3 (tiga) PTN-BLU yang perlu mendapat perhatian karena mengalami penurunan tingkat efisiensi yang relatif besar, yaitu Politeknik Negeri Lampung (sebesar 37 %), Politeknik Negeri Jember (sebesar 36%), dan Politeknik Negeri Semarang (sebesar 34%).

Tabel 5. Tingkat Efisiensi PTN BLU Tahun 2020-2021

No.	Nama PTN-BLU	Tingkat Efisiensi		Perubahan tingkat efisiensi
		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	1,00	0,74	(0,26)
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	0,63	0,47	(0,16)
3	Politeknik Negeri Lampung	1,00	0,63	(0,37)
4	Politeknik Negeri Jakarta	1,00	0,86	(0,14)
5	Politeknik Negeri Madiun	1,00	1,00	0,00
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	1,00	1,00	0,00
7	Politeknik Negeri Semarang	0,93	0,58	(0,34)
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	0,78	0,71	(0,07)
9	Politeknik Negeri Jember	1,00	0,64	(0,36)
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	0,99	0,76	(0,23)
Rerata tingkat efisiensi		0,93	0,74	(0,19)

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

Secara umum tingkat efisiensi rata-rata tahun 2020 pada 10 satker PTN-BLU di atas adalah sebesar 0,93 (atau 93%). Adapun pada tahun 2021, tingkat efisiensi rata-ratanya sebesar 0,74 (atau 74%). Ini berarti bahwa tingkat efisiensi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tingkat efisiensi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,19 (atau 19%). Selain itu, perlu juga menjadi perhatian bagi manajemen PTN-BLU berkenaan, tingkat efisiensi rata-rata sebesar 74 persen pada tahun 2021 menandakan PTN-BLU tersebut belum efisien dan belum mampu mengoptimalkan sumber daya (input) yang dimiliki untuk mencapai target keluaran (output) yang ditetapkan, mengingat tingkat efisiensi yang optimal adalah sebesar 100 persen.

4.5 Tingkat Kinerja Anggaran pada 10 PTN Vokasi

Dari tabel 6, Politeknik Negeri Nusa Utara merupakan satu-satunya PTN-BLU yang mampu mempertahankan tingkat kinerja dan bahkan kinerjanya naik sebesar 0,41 persen pada tahun 2021. Adapun 9 PTN-BLU lainnya mengalami penurunan tingkat kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020). Satker Politeknik Negeri Jember mengalami penurunan tingkat kinerja yang paling besar (yaitu sebesar 9,13 persen) dibandingkan dengan PTN-BLU lainnya di tahun 2021.

Tabel 6. Tingkat Kinerja PTN BLU Tahun 2020-2021

No.	Nama Universitas	Tingkat Kinerja (dalam persen)		Perubahan tingkat kinerja
		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	96,60	90,37	(6,23)
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	86,25	81,07	(5,18)
3	Politeknik Negeri Lampung	94,38	87,24	(7,14)
4	Politeknik Negeri Jakarta	95,86	91,41	(4,45)
5	Politeknik Negeri Madiun	99,48	99,46	(0,02)
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	92,21	92,62	0,41
7	Politeknik Negeri Semarang	93,90	86,08	(7,82)
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	91,08	89,16	(1,92)
9	Politeknik Negeri Jember	96,50	87,37	(9,13)
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	95,80	92,40	(3,40)
Rerata tingkat kinerja		94,21	89,72	(4,49)

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

Secara umum, tingkat kinerja rata-rata pada 10 PTN-BLU pada tahun 2020 adalah sebesar 94,21. Adapun untuk tahun 2021, rata-rata tingkat kinerja 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud hanya sebesar 89,72 persen (atau mengalami penurunan tingkat kinerja anggaran sebesar 4,49 persen).

4.6 Perbandingan Tingkat Efisiensi Belanja dan Kinerja Anggaran

Secara sederhana, perbedaan tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat efisiensi anggaran dan tingkat kinerja anggaran pada 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud tahun anggaran 2020 dan 2021. Berikut ini data perbandingan tingkat efisiensi dan tingkat kinerja anggaran tahun 2020 dan 2021.

Tabel 7. Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Kinerja Tahun 2020-2021

No.	Nama Universitas	Tingkat Efisiensi		Perubahan tingkat efisiensi	Tingkat Kinerja		Perubahan tingkat kinerja
		2020	2021		2020	2021	
1	Politeknik Negeri Lhokseumawe	1,00	0,74	(0,26)	96,60	90,37	(6,23)
2	Politeknik Negeri Sriwijaya	0,63	0,47	(0,16)	86,25	81,07	(5,18)
3	Politeknik Negeri Lampung	1,00	0,63	(0,37)	94,38	87,24	(7,14)
4	Politeknik Negeri Jakarta	1,00	0,86	(0,14)	95,86	91,41	(4,45)
5	Politeknik Negeri Madiun	1,00	1,00	0	99,48	99,46	(0,02)
6	Politeknik Negeri Nusa Utara	1,00	1,00	0	92,21	92,62	0,41
7	Politeknik Negeri Semarang	0,93	0,58	(0,35)	93,90	86,08	(7,82)
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	0,78	0,71	(0,07)	91,08	89,16	(1,92)
9	Politeknik Negeri Jember	1,00	0,64	(0,36)	96,50	87,37	(9,13)
10	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	0,99	0,76	(0,23)	95,80	92,40	(3,40)
Rata-rata tingkat efisiensi (10 PTN)		0,93	0,74	(0,19)	94,21	89,72	(4,49)

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran (2023)

Dari Tabel 7 di atas, tingkat efisiensi rata-rata pada tahun 2020 sebesar 93 persen dan tahun 2021 sebesar 74 persen. Artinya, secara rata-rata, tingkat efisiensi pada 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud periode tahun 2020 dan 2021 sebesar 83,50 persen atau mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar 19 persen. Hanya Politeknik Negeri Madiun dan Politeknik Negeri Nusa Utara yang berhasil mempertahankan tingkat efisiensinya pada batas optimal (100 persen atau 1), selebihnya (8 Satker) mengalami penurunan tingkat efisiensi.

Demikian pula untuk tingkat kinerja anggaran. Tingkat kinerja anggaran pada tahun 2020 sebesar 94,21 persen dan tahun 2021 sebesar 89,72 persen. Artinya, secara rata-rata, tingkat kinerja anggaran pada 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud periode tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 91,96 persen atau mengalami penurunan tingkat kinerja anggaran sebesar 4,49 persen. Dari 10 Satker, hanya 1 Satker saja, yaitu Politeknik Negeri Nusa Utara yang mampu mempertahankan tingkat kinerja anggarannya, bahkan mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen. Adapun untuk 9 satker lainnya, mengalami tingkat kinerja anggaran pada tahun 2021.

Menarik mencermati hasil penelitian ini, khususnya mengenai tingkat efisiensi dan tingkat kinerja anggaran yang mengalami penurunan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun secara rata-rata, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) aspek Implementasinya relatif sangat baik. Nilai kinerja anggaran (NKA) aspek Implementasi 10 PTN-BLU lingkup Ditjen Vokasi Kemendikbud Periode Tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 91,96 persen. Artinya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, nilai kinerja anggaran (NKA) tersebut masuk ke dalam kategori "sangat baik" (NKA > 91 persen). Namun demikian, perlu dicermati nilai kinerja anggaran (NKA) per satker, masih ada yang belum mencapai 91 persen (kategori "sangat baik"), tetapi masuk kategori "baik" (NKA, 81 s.d. 90 persen), yaitu pada Satker Politeknik Negeri Sriwijaya (sebesar 83,66 persen).

Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa hasil penelitian ini seperti kontradiktif, di satu sisi terjadi penurunan tingkat efisiensi dan tingkat kinerja anggaran pada tahun 2020 dan 2021, namun untuk rata-rata nilai kinerja anggaran (NKA) aspek implementasi masih tergolong "sangat baik" (NKA. 91). Hal ini disebabkan, dari 4 (empat) komponen nilai Kinerja Anggaran, terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami kenaikan, yaitu Penyerapan Anggaran sebesar 1,63 persen, Konsistensi antara Penyerapan Anggaran dan perencanaan sebesar 1,20 persen, dan Capaian Output sebesar 1,25 persen. Adapun 1 (satu) komponen lagi, yaitu tingkat efisiensi mengalami penurunan sebesar 19 persen.

Selain itu, dalam penilaian kinerja anggaran, juga diperhitungkan bobot untuk masing-masing komponen, dengan bobot terbesar berada pada komponen Capaian Output (sebesar 43,5%), diikuti oleh tingkat efisiensi (sebesar 28,6%), tingkat konsistensi (sebesar 18,2%), dan terakhir penyerapan anggaran (sebesar 9,7%). Mengingat Capaian Output merupakan komponen dengan bobot terbesar, maka manajemen Satker (Kuasa Pengguna Anggaran) lebih fokus untuk mencapai target ini, dan itu sejalan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian Output dan Outcome.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Amal & Wibowo (2022), yang menyebutkan bahwa pada kasus evaluasi kinerja anggaran di Provinsi DKI Jakarta, kinerja

keuangan pada masa Pandemi Covid 2019 seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR dapat dipertahankan dalam jangka pendek. Meskipun demikian rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan anggaran kesehatan berpengaruh negatif terhadap Covid-19 (Susanto, 2022).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi efisiensi dan kinerja anggaran PTN Vokasi-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Terjadi penurunan tingkat efisiensi pada 10 PTN Vokasi-BLU secara rata-rata sebesar 19 persen dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 83,50 persen pada periode tahun 2020 dan 2021. Angka tersebut dianggap kurang efisien, mengingat tingkat efisiensi yang optimal adalah 100 persen. Selanjutnya ditinjau secara kinerja anggaran, terjadi penurunan pada PTN Vokasi-BLU sebesar 4,49 persen. Secara umum, tingkat kinerja anggaran rata-rata sebesar 91,96 persen, Hasil ini sejalan dengan penelitian lainnya yang membuktikan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengelolaan keuangan masing-masing PTN Vokasi-BLU. Hal ini dapat dilihat dengan kecenderungan tingkat efisiensi anggaran dan tingkat kinerja yang masih relatif sama pada semua PTN Vokasi-BLU. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tata kelola yang dilaksanakan oleh PTN-BLU selama pandemi Covid-19, sehingga organisasi PTN-BLU cenderung tidak antisipatif terhadap perubahan yang terjadi. Hampir seluruh satker mengalami penurunan tingkat kinerja dan hanya 1 (satu) satker saja yang mengalami kenaikan tingkat kinerja anggarannya.

Berdasarkan simpulan hasil analisis, dapat disampaikan rekomendasi atas pola pengelolaan keuangan PTN Vokasi-BLU lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud TA 2020-2021, sebagai berikut. Pertama, peningkatan efisiensi perlu terus didorong dengan memberi perhatian khusus terhadap pengalokasian anggaran dan output (keluaran) yang dihasilkan oleh PTN Vokasi-BLU sehingga peruntukan alokasi anggaran yang digunakan dapat mendorong output yang berkualitas seperti jumlah lulusan, jumlah penelitian yang berdaya saing tinggi, dan publikasi pada jurnal bereputasi. Kedua, perlu memperdalam objek penelitian berikutnya karena penelitian ini merupakan studi awal dalam mengukur kinerja PTN Vokasi-BLU melalui tingkat efisiensi dan tingkat kinerja anggaran. Penelitian lanjutan dibutuhkan untuk menjawab determinan (faktor-faktor) apa saja yang menyebabkan suatu PTN Vokasi-BLU sehingga memiliki tingkat efisiensi tinggi dan tingkat kinerja anggaran maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. W., & Thomas, A. (2022). Aplikasi Pengelolaan Data Rba (Rencana Bisnis Dan Anggaran) Pada Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Konawe. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, 7(1), 60–68.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.
- Aubyn, M. S., Garcia, F., Pais, J., St. Aubyn, M., Pina, Á., & Pa, J. (2009). Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education. In *Economic Papers no.390* (Issue January).
- Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. *European Journal of Operational Research*, 98, 175–212.

- Caves, R. E., & Barton, D. (1990). Efficiency in US Manufacturing Industries. In MIT Press.
<https://mitpress.mit.edu/9780262031578/efficiency-in-u-s-manufacturing-industries/>
- Daghbashyan, Z. (2014). CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 245 The Economic Efficiency of Swedish Higher Education Institutions Zara Daghbashyan. January 2011.
- de Kruijf, J. A. M., & van Thiel, S. (2018). Political Control of Arm's-Length Agencies: One Standard Does Not Fit All. *International Public Management Journal*, 21(3), 461–476.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2016.1269857>
- De Witte, K., & López-Torres, L. (2017). Efficiency in education: A review of literature and a way forward. In *Journal of the Operational Research Society* (Vol. 68, Issue 4).
<https://doi.org/10.1057/jors.2015.92>
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2021). SMART. <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/>
- Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency <http://www.jstor.org/stab>. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 120(3), 253–290.
- Jana, S. K. (2017). Efficiency Analysis of Higher Education Institutes : A Study on Colleges under Vidyasagar University in West Benga *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 4(January), 35–40. <https://doi.org/10.21276/sjebm.2017.4.1.5>
- Jati, H. (2015). Penilaian Efisiensi Universitas LPTK di Indonesia dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis. *Elinvo*, 1(1). <https://doi.org/doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.10877>
- Mandl, U., Dierx, A., & Ilzkovitz, F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending. In *Economic Papers EU* (Issue January). <https://doi.org/10.2765/22776>
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. , 15(1), 1-11. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- Oktavia, D. C. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Rumah Sakit (Studi Kasus pada RSUD Nganjuk). Universitas Islam Malang.
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2022). Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Penumpang Kota Surakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2).
- Pribadi, Y., Akhmadi, M. H., & Wardhana, I. W. (2022). Efficiency of Public Universities: The Role of Financial Autonomy in The Pandemic Situation. *Jurnal Akurasi*, 4(2).
<https://doi.org/doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art179>
- Robst, J. (2001). Cost efficiency in public higher: Education institutions. *Journal of Higher Education*, 72(6), 730–750. <https://doi.org/10.2307/2672901>
- Susanto, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Mitigasi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
- United Nations Development Programme. (2020). Overview Human Development Report.
- Waluyo, B. (2018). Balancing financial autonomy and control in agencification: Issues emerging from the Indonesian higher education. *International Journal of Public Sector Management*.
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2017-0272>
- Widodo, P. A., & Khusaini, M. (2014). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan (Studi Kasus: 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2)
- Winarti, E. (2013). Pengukuran Efisiensi Jurusan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.